

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengadakan perubahan yang berkesinambungan ke arah kemajuan yang lebih baik. Pelaksanaan pembangunan yang dikerjakan perlu memacu pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat; membangkitkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat; meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab; serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Secara umum, pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan masyarakat secara terencana dari keadaan tertentu menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu konsep yang dinamis sebab selalu berubah sesuai dengan kondisi kerangka sosial yang menyertainya. Tujuan pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.

Pembangunan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Untuk melaksanakan pembangunan, diperlukan dukungan dana yang cukup besar sehingga pemerintah berupaya dengan berbagai jalan untuk melaksanakan pembangunan.

Pada masa Orde Baru, pembangunan di Indonesia dilaksanakan secara bertahap yaitu dengan dilaksanakannya repelita yang diadakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk memberi arah pedoman untuk mengembangkan negara dan bangsa. Desa memegang peranan penting di dalam menentukan usaha mewujudkan tujuan pembangunan desa (Maskun, 1994: 20).

Untuk pelaksanaan pembangunan itu, kemampuan serta perbaikan aparatur pemerintah perlu ditingkatkan untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab serta bertujuan untuk mengatur sumber daya nasional yang memberi kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Seiring dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah terjadi perubahan atau paradigma baru dalam sistem Pemerintahan Daerah, yaitu telah terjadi pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa kepala desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Dengan kata lain, daerah diberi kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur rumah tangganya sendiri ( UUD Pemerintahan Daerah, 1999: 18-19).

Tujuan diberikan otonomi kepada daerah adalah agar daerah yang bersangkutan lebih berdaya guna dan berhasil guna serta untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Daerah dituntut dapat menggali sumber kekayaan daerahnya. Sumber-sumber pembiayaan yang penting untuk diperhatikan adalah penerimaan daerahnya sendiri, karena sumber inilah yang merupakan salah satu wujud partisipasi langsung masyarakat suatu daerah dalam mendukung proses pembangunan.

Kabupaten Cilacap terletak di ujung barat daya di wilayah Jawa Tengah mempunyai penduduk sangat padat kurang lebih 1,9 juta jiwa sebagian besar bertempat tinggal di daerah pedesaan, maka peran pemerintahan terutama kepala desa sangat penting. Kepala desa memimpin mereka, dan diangkat melalui pilihan langsung sehingga dalam memimpin rakyatnya mendapat kepercayaan yang sangat tinggi, proses itu diharapkan akan mempermudah bagi kepala desa untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan cara selalu memberi pengertian tentang maksud dan tujuan pembangunan, hasil-hasil yang ingin dicapai seperti peningkatan kesejahteraan, masa depan yang lebih baik.

Di samping itu, di dalam pemerintahan desa terdapat suatu lembaga masyarakat yang disebut BPD (Badan Perwakilan Desa). Lembaga ini beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat dan unsur-unsur pemuda di desa yang dipilih langsung oleh warganya untuk ikut duduk sebagai perwakilan di Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Lembaga ini berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kehadiran lembaga ini sangat penting dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan.

Dalam melaksanakan pembangunan desa, kepala desa memiliki peranan dan kedudukan sebagai pimpinan desa yang bertanggung jawab atas terlaksananya pembangunan. Kepala desa bekerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat setempat antara lain, organisasi kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan organisasi keagamaan.

Organisasi yang dimaksud di atas harus betul-betul memperhatikan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa dengan merencanakan melalui rapat Musbangdes (Musyawarah badan anggaran desa) yang disusun secara berkesinambungan melalui perencanaan yang dikembangkan dari bawah (*botton-up*). Dalam rangka pembangunan desa, unsur kepala desa amat penting peranannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang telah diprogramkan demi kepentingan kesejahteraan hidup warga desa.

Kepala desa selaku pimpinan pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup desa harus bisa memainkan peran dan fungsinya secara optimal, baik itu sebagai seorang pelayan masyarakat maupun sebagai perantara yang bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam masyarakat yang mencakup lingkup area yang menjadi kewenangannya. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat harus didengar dan ditindak lanjuti oleh seorang kepala desa agar yang menjadi tujuan bersama bisa tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa maka perlu ditingkatkan sumber daya manusia dan kualitas penduduk desa yang makin mantap.

Hal itu harus didukung adanya kesadaran masyarakat desa perlunya pendidikan untuk membentuk Indonesia seutuhnya yang selalu tahu dan mengerti akan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dimungkinkan Pembangunan Nasional akan lebih maju karena didukung oleh masyarakat berkualitas dan memiliki pengetahuan luas ( Sajogyo, 1999: 35).

Kehidupan masyarakat status sosial dan ekonomi dapat dilihat dari tingkat pendapatan, pekerjaan, kedudukan dalam masyarakat, dan pendidikan. Status sosial dan ekonomi yang disebabkan karena adanya sesuatu yang dihargai dalam suatu masyarakat adalah sangat penting karena akan menjalankan fungsi mekanisme dalam

masyarakat. Status adalah kedudukan sosial seseorang dan kelompok dalam masyarakat. Dalam pembangunan desa, apabila masyarakat aktif berpartisipasi hal ini berarti akan membantu tercapainya terhadap pembangunan desa sesuai dengan tujuan (Polak, 1996: 196).

Status sosial dan ekonomi masyarakat Desa Adiraja Wetan yang beraneka ragam, harus diperhatikan guna suksesnya pelaksanaan pembangunan. Status ekonomi perlu diperhatikan karena masyarakat di Desa Adiraja Wetan memiliki bermacam-macam pekerjaan, di antaranya petani, PNS, pedagang, karyawan swasta, buruh. Sedangkan status sosial penduduk Desa Adiraja Wetan, tingkat pendidikannya beraneka ragam, ada yang lulusan SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan yang tidak lulus SD juga ada.

Diperhatikanya tingkat sosial dan ekonomi diharapkan dalam menentukan prioritas program, baik fisik maupun non fisik yang akan dilaksanakan bisa mengakomodasi dan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat Desa Adiraja Wetan, bukan hanya kelompok tertentu. Sesuai dengan pembangunan dewasa ini, masalah-masalah perencanaan desa memegang peranan penting untuk menjamin suksesnya pembangunan tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam pengembangan aktivitas-aktivitas pembangunan menuju pencapaian tujuan, diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik untuk dijadikan pedoman yang menentukan setiap pelaksanaan pembangunan.

Agar tujuan pembangunan dapat tercapai dengan hasil baik, dibutuhkan peranan kepemimpinan kepala desa yang mempunyai jiwa pemimpin yang bisa menjadi panutan bagi masyarakatnya dengan baik. Partisipasi masyarakat dipengaruhi adanya kepemimpinan kepala desa serta adanya status sosial yang dimiliki oleh warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian jelas, untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat terhadap pembangunan desa, peranan kepemimpinan kepala desa sangat penting, di samping status sosial yang dimiliki masing-masing warga.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **KEPEMIMPINAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI DESA ADIREJA WETAN, KECAMATAN ADIPALA, KABUPATEN CILACAP TAHUN 1999-2013.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian skripsi ini akan menjawab:

1. Kondisi umum Desa Adireja Wetan.
2. Sejarah kepemimpinan Kepala Desa Adireja Wetan.
3. Pelaksanaan pembangunan Desa Adireja Wetan tahun 1999-2013.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kondisi umum Desa Adireja Wetan.
2. Untuk mengetahui sejarah kepemimpinan Kepala Desa Adireja Wetan.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan Desa Adireja Wetan tahun 1999-2013.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Praktis**

Hasil dalam penelitian ini diharapkan berguna sebagai salah satu referensi dalam menganalisis peran kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan di lingkup desa, khususnya di Desa Adireja Wetan Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap.

## 2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Kecamatan Adipala khususnya dalam pengembangan kepemimpinan kepala desa dan pembangunan di wilayah pedesaan.

### E. Tinjauan Pustaka

Menurut Endah (2006: 5) dalam skripsinya "*Pola Kepemimpinan Kepala Desa Pekuncen, Kecamatan Bobotasri, Kabupaten Purbalingga*". Kepemimpinan adalah suatu proses guna mempengaruhi kegiatan kelompok supaya teratur dalam tugasnya dan usahanya untuk merumuskan dalam mencapai tujuan, segala usaha pekerjaan dan kegiatan melalui proses-proses tertentu untuk membawa masyarakat atau pengikutnya untuk ikut serta aktif dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama.

Menurut Karsito (2001: 10) dalam skripsinya "*Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kecamatan Adipala Kabupaten Cilacap*". Kepemimpinan adalah cara seseorang pemimpin atau pola perilaku yang ditampilkan oleh seseorang pemimpin dalam melaksanakan tugas wewenang serta kewajiban dalam menjalankan roda organisasi.

Menurut Mukmin (2010: 7) dalam skripsi yang berjudul "*Efektifitas Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Desa Terhadap Pembangunan*". Bahwa kepala desa adalah kepala atau pemimpin yang diangkat oleh Bupati atau Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dari calon pemilih sebagai administrator pembangunan dan administrator tingkat desa. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan pada tingkat desa memegang jabatan kepala desa

apabila terpilih oleh warga masyarakat yang bersangkutan karena jabatan kepala desa bukan jabatan melalui pengangkatan.

Dari ketiga hasil penelitian di atas meskipun penelitian tentang kepemimpinan, tetapi tidak mengkaji tentang kepemimpinan kepala desa terhadap pembangunan, keadaan sosial ekonomi masyarakat, dan sejarah kepemimpinan kepala desa. Dalam hal inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya.

## **F. Landasan Teori dan Pendekatan**

### **1. Pengertian Kepemimpinan**

Peranan pemimpin timbul karena pemimpin memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Dia mempunyai lingkungan yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka ragam, masing-masing pemimpin akan mempunyai suatu lingkungan yang berlainan, tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakikatnya sama. Baik pemimpin tingkat atas (*top manager*), pemimpin tingkat menengah (*middle manager*) maupun pemimpin tingkat bawah (*low manager*) akan mempunyai jenis peranan yang sama, hanya berbeda lingkungan yang akhirnya membuat bobot peranan itu berbeda.

Kepemimpinan menurut Soekanto (1999: 318) adalah suatu kemampuan dari seseorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain yang dipimpin, sehingga orang lain itu bertingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh pemimpin tersebut. Jadi pola atau tipe kepemimpinan adalah suatu cara seseorang pemimpin atau pola perilaku yang ditampilkan oleh seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas wewenang serta kewajiban dalam menjalankan roda organisasi.

Kepemimpinan dibedakan antara lain kepemimpinan sebagai kedudukan dan kepemimpinan sebagai suatu proses sosial. Sebagai kedudukan kepemimpinan

merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau sesuatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat (Soekanto, 1993: 330).

Pengertian kepemimpinan menurut Terry (1985: 192) adalah suatu pertumbuhan alami dari orang yang berserikat untuk suatu tujuan dalam suatu kelompok, sedangkan kepemimpinan menurut Kartono (1982:38) kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang agar bekerja sama untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan didalam situasi tertentu. Kepemimpinan itu akan terjadi apabila didalam situasi tertentu seseorang mempengaruhi perilaku orang lain baik secara perorangan atau kelompok.

Menurut Max Weber (Kartono, 2002: 73) ada tiga peranan tipe kepemimpinan yaitu:

1) Kepemimpinan Karismatik

Kepemimpinan karismatik mengemukakan bahwa para pengikut membuat atribusi dari kemampuan kepemimpinan yang heroik atau luar biasa mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu.

2) Kepemimpinan Demokratik

Kepemimpinan demokratik berorientasi pada manusia, dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Kepemimpinan demokratis menghargai potensi setiap individu; mau mendengarkan nasihat dan sugesti bawahan.

### 3) Kepemimpinan Administratif

Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif secara efektif. Dengan kepemimpinan administratif ini diharapkan adanya perkembangan teknis yaitu teknologi, industri, manajemen modern, dan perkembangan sosial di tengah masyarakat.

Pemimpin merupakan faktor bagi sukses dan gagalnya suatu organisasi karena pemimpin yang sukses itu akan mampu mengelola organisasinya, mampu mengantisipasi perubahan yang tiba-tiba, dapat mengoreksi kelemahan-kelemahan dan sanggup membawa organisasi ke sasaran dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Berbicara tentang kepemimpinan, maka juga berbicara tentang pemimpin, tentang yang dipimpin, tentang interaksi keduanya, tentang tujuan yang hendak dicapai, tentang situasi, tentang sekelompok orang yang berbeda dalam suatu organisasi.

Kepala desa harus memiliki kemampuan, bakat, kecakapan, dan sifat kepemimpinan, di samping menjalankan kegiatan-kegiatan, fungsi dan tanggung jawab. Penjelasan di atas maka kepala desa harus dapat menjalankan program pembangunan di desanya jika dia memiliki sifat-sifat dan syarat sebagai seorang pemimpin. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Atmosudirdjo (2002: 212) bahwa seorang pemimpin harus memiliki 4 (empat) syarat pokok yaitu:

- 1) Pemimpin harus peka terhadap iklim lingkungannya, harus mendengarkan saran-saran dan pandangan-pandangan dari orang disekitarnya yang dia ketahui mempunyai banyak pengalamannya yang relevan dengan tugas yang dia emban.

- 2) Pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya, paling sedikitnya dia harus menyadari kekurangannya dan menjadi suri tauladan mengenai segala apa yang ia instruksikan kepada bawahannya.
- 3) Pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya, setia kepada organisasinya, setia kepada atasannya, setia kepada bawahannya, setia kepada mission atau tugasnya serta setia kepada pemerintahannya dan sebagainya.
- 4) Pemimpin harus mampu mengambil keputusan, artinya harus cakap, mampu, pandai mengambil keputusan setelah semua faktor yang relevan diperhitungkan.

Berdasarkan dari kutipan di atas, jelaslah kepemimpinan kepala desa sangat diharapkan oleh pemerintah sekarang seperti kepemimpinan yang Pancasilais sejati. Untuk dapat mengusahakan orang lain bekerja sama dengannya, maka seorang pemimpin dapat menggunakan kewibawaan tertentu.

Hal ini memerlukan segi kepemimpinan yang sedikit berbeda dengan instansi lain karena kepemimpinan kepala desa harus peka terhadap segi politik masyarakat. Untuk menggerakkan hal-hal tersebut, maka kualitas kepemimpinan yang sedikit harmonis dalam birokrasi pemerintahan sangat diperlukan. Apalagi untuk tugas-tugas atau kegiatan-kegiatan pembangunan dari pemerintahan yang bersifat baru. Kepala desa sebagai unsur pemimpin, adalah penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat di wilayah desanya.

## 2. Pengertian Kepala Desa

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa bab IV paragraf 2 pasal 14 menyatakan bahwa kepala desa mempunyai peranan sebagai penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban.

Untuk menjalankan tugas tersebut, maka kepala desa mempunyai fungsi yaitu:

- 1) Menggerakkan potensi masyarakat.
- 2) Melaksanakan tugas dari pemerintah atasannya.
- 3) Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan Desa.
- 4) Melaksanakan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa (UUD Pemerintahan Daerah, 1999: 18-19).

Pemerintahan desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga desa. Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, kepala desa:

- 1) Bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD.
- 2) Menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

Pemerintahan desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangganya, urusan yang belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten. Fungsi dari pemerintahan desa:

- 1) Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
- 2) Melakukan tugas di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- 3) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat.
- 4) Melakukan pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Kepala desa berkedudukan sebagai alat pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD tugas dan kewajiban kepala desa adalah:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan nasional dan melaporkannya kepada pemerintah melalui Bupati dengan tembusan Camat.
- 2) Mendamaikan perselisihan masyarakat desa segala perselisihan yang telah didamaikan oleh kepala desa bersifat pihak-pihak berselisih.
- 3) Membina masyarakat desa.
- 4) Membina perekonomian desa.
- 5) Melaksanakan pembangunan desa dibantu dengan lembaga masyarakat di desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4 Tahun 1984 ditegaskan, kepala desa adalah orang yang dipercaya untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban dalam memimpin penyelenggaraan di tingkat desa/kelurahan. Adapun fungsi desa adalah merencanakan dan mengkoordinir kegiatan pemerintahan desa serta memelihara hubungan baik untuk bekerja sama dengan warga masyarakat, instansi ataupun badan-badan organisasi tingkat desa.

Kepala desa mempunyai kemampuan untuk menumbuhkan kegairahan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan suatu faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada di daerah kekuasaannya, demikian juga kedudukannya sebagai

kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu-pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka mau untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala desa beserta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan yang telah diprogramkan.

### 3. Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa dan merupakan seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat desa. Pembangunan desa merupakan program pembangunan yang perlu menghiraukan dan memperhitungkan pola kehidupan yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Pembangunan desa akan menyentuh kepentingan masyarakat desa yang paling dasar yang dapat dirasakan manfaatnya oleh setiap anggota masyarakat. Karena itu pembangunan desa harus bersifat praktis dan realistik.

Masalah pembangunan desa, adalah masalah sosial ekonomi dan politik di dalam negeri. Artinya pembangunan desa dengan ciri-ciri masih lemah dalam berbagai aspek pembangunannya adalah menjadi urusan pemerintah dan rakyat negara yang bersangkutan.

Pembangunan desa, adalah proses pembangunan yang diarahkan kepada masyarakat (*people centered*), mengutamakan segi kehidupan manusia dan

mementingkan aspek-aspek humanisme. Pembangunan masyarakat desa lebih mengutamakan sumber daya insani, dan menghargai segi pandangan masyarakat dalam menangani dan memecahkan masalahnya. Inisiatif masyarakat akan lebih dihargai dalam usaha perencanaan dan strategi pembangunan yaitu strategi mengalahkan inisiatif pembangunan dari bawah, atau dalam peristilahan teknis disebut *Grass Root Initiative Service* (GRIS).

Pembangunan desa, keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor manusia. Dalam menggairahkan pembangunan desa, masyarakat dihidupkan untuk berkiprah dalam kehidupan berdemokrasi, berkeadilan, memelihara hak dan kewajiban, memelihara idealisme dan mampu menularkan pendapat maupun menyusun rencana pembangunan yang berproses dari tingkat bawah.

Berdasarkan kepada dasar-dasar pikiran tersebut, maka kebijaksanaan pelaksanaan pembangunan desa dirumuskan sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip pembangunan desa menurut I Nyoman Beratha (1991: 53) adalah:
  - 1) Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
  - 2) Dinamis dan berkelanjutan.
  - 3) Menyeluruh, terpadu dan terkordinasikan.
- b. Pokok-pokok kebijakan pembangunan desa menurut Kansil (1984: 254) adalah:
  - 1) Pemanfaatan sumber daya manusia dan potensi alam.
  - 2) Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
  - 3) Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.
- c. Sasaran pembangunan desa.

Menjadikan semua desa-desa diseluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa Swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan makin meningkat.

d. Objek dan subjek pembangunan

Objek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya serta mencakup pula segala aspek kehidupan yang ada di desa. Teknologinya tersebut merupakan faktor ekstren dan diperkenalkan dengan maksud agar masyarakat desa yang bersangkutan dapat merubah kebiasaan tradisional yang dinilai rendah efisiensi dan produktivitasnya dalam proses pembangunan atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

e. Mekanisme pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dilakukan sistem perencanaan dari bawah (*bottom up planning*) melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di tingkat desa. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam pembangunan nasional karena sebagian besar masyarakat Indonesia bertempat tinggal di daerah pedesaan. Keberhasilan pembangunan desa memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju pada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas wilayah yang sehat serta dinamis.

Dalam pembangunan desa, peranan pemerintah desa harus mampu dalam mengatur urusan rumah tangga desanya atas kemampuannya sendiri dengan memanfaatkan potensi dan sumber-sumber kekayaan serta pendapatan yang terdapat di desanya. Berdasarkan hal-hal tersebut menurut Kartasapoetra dkk (1986: 48-50) terdapat tiga tingkat perkembangan desa yaitu:

1) Desa Swadaya

Desa ini adalah desa yang sifatnya masih tradisional dengan adat istiadatnya yang masih sangat mengikat, hubungan antara manusia sangat erat, serta pengawasan sosial didasarkan atas kekeluargaan. Mata pencaharian penduduknya pada sektor

primer, tingkat teknologinya masih sangat sederhana sehingga produktifitas rendah, disertai keadaan prasaran desa yang masih langka dan sederhana.

## 2) Desa Swakarya

Desa ini setingkat lebih maju dari desa swadaya, dengan adat istiadat masyarakat desa yang sedang mengalami masa transisi, pengaruh luar mulai masuk ke desa yang mengakibatkan perubahan cara berpikir dan bertambahnya lapangan kerja di desa, mata pencaharian penduduk sudah berkembang dari sektor primer ke sekunder, produktivitas mulai meningkat diimbangi dengan bertambahnya prasarana desa.

## 3) Desa Swasembada

Desa ini setingkat lebih maju dari desa swakarya, dengan adat istiadat sudah tidak mengikat, hubungan antara manusia bersifat nasional, mata pencaharian penduduk sudah beraneka ragam dan bergerak di sektor tersier, teknologi sudah benar-benar dimanfaatkan dalam bidang pertanian, sehingga produktivitas tinggi diimbangi dengan prasarana desa yang cukup baik.

Sebagai prinsip pembangunan desa adalah dari, untuk, dan oleh rakyat, oleh karena itu hasilnya juga harus dinikmati oleh seluruh masyarakat. Selain itu pembangunan desa tidak dimaksudkan hanya untuk dinikmati oleh segelintir masyarakat dan juga bagaimana peranan kepala desa menggerakkan, memotivasi seluruh masyarakat untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan.

Hal ini bisa terwujud apabila seluruh lapisan masyarakat diikutsertakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan mengevaluasi kembali hasil pembangunan yang telah dicapai di dalam wilayahnya. Kepala Desa Adiraja Wetan dalam pelaksanaan pembangunan, selalu menjadi perintis terdepan, pembimbing, panutan, pengayom, bisa memotivasi kerja dan selalu mendorong agar perangkat desa

dan masyarakatnya untuk berprakasa, berinisiatif, memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dan berkarya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan sosiologi dan politik. Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengkaji hubungan antara individu dalam suatu masyarakat yang luas dan kompleks. Pada masyarakat yang kompleks bentuk-bentuk kerjasama mutlak diperlukan karena di dalam kehidupan masyarakat terjadi distribusi peran dan saling ketergantungan dalam aktifitas kehidupan, sehingga pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia dalam konteks sosial oleh karena itu yang dipelajari dalam sosiologi adalah tingkah laku manusia baik individu maupun aktif dalam hubungan masyarakat (Maran, 2001: 14).

Pendekatan politik digunakan untuk mempelajari aspek-aspek organisasional secara lebih intensif serta tipe-tipe kepemimpinan politik serta perubahan pola-pola hubungan antara ideologi dan kepemimpinan. Kepala desa dipilih secara langsung oleh rakyat, pada prinsipnya kepala desa harus mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap berjalanya pemerintahan dan pembangunan di desa (Efriza, 2008: 14).

## G. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian sejarah karena serangkaian data dan fakta tersebut berangkat dari metode sejarah yang terdiri dari 4 langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

### 1. Heuristik

*Heuristik* yaitu berasal dari kata Yunani *heuriskein*, artinya mencari. Menurut G. J. Reiner seperti yang ditulis Abdurrahman (1900), *heuristik* adalah suatu tehnik, suatu seni, dan bukan suatu ilmu. *Heuristik* seringkali merupakan suatu keterampilan dalam menemukan, mengenali dan memperinci biografi atau mengklasifikasi dan merawat catatan-catatan. Lebih jelasnya seperti apa yang dikatakan Carrad bahwa *heuristik* adalah merupakan langkah awal sebagai sebuah kegiatan mencari sumber-sumber, mendapatkan data, atau materi sejarah atau *evidensi* sejarah (Sjamsuddin, 2007: 86). Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *heuristik* merupakan langkah pertama dalam penulisan sejarah yaitu dengan pengumpulan data sebanyak mungkin untuk dijadikan sumber penelitian sejarah.

*Heuristik* merupakan kegiatan pengumpulan data-data sejarah, maka ada beberapa tehnik dalam pengumpulan data tersebut yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: sumber tertulis adalah penulis melakukan pencarian dokumen, arsip-arsip berupa data. Dalam hal ini peneliti mencari sumber tertulis atau bahan dokumen di kantor desa, sedangkan sumber lisan adalah peneliti melakukan dengan cara wawancara dan observasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Pelacakan sumber sejarah lisan bisa dilakukan dengan wawancara individual yang diperkaya dengan wawancara simultan atau wawancara simultan dipertegas dengan wawancara individual (Priyadi, 2011: 69).

## 2. Kritik Sumber

Setelah sumber sejarah dalam berbagai katagorinya itu terkumpul, tahap yang berikutnya adalah verifikasi atau lazim disebut juga dengan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus juga diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (*otentisitas*) yang dilakukan melalui kritik ekstern, dan keabsahan tentang kesahihan sumber (*kredibilitas*) yang ditelusuri melalui kritik intern. Dalam penelitian ini yang dilakukan yaitu mencari keaslian sumber (*otentisitas*), sumber ini dapat diuji dengan melakukan pertanyaan (1) kapan sumber itu dibuat, (2) dimana sumber itu dibuat, (3) siapa yang membuat, (4) apakah sumber itu dalam bentuk yang asli.

Kritik intern: yaitu kritik terhadap isi baik sumber lisan maupun dokumen, untuk memperoleh kredibilitas oleh sumber-sumber tersebut. Dalam penelitian ini penilaian intrinsik mencari suatu sumber yang dapat dilakukan dengan dua pertanyaan (1) apakah ia mampu untuk mampu memberikan kesaksian, (2) apakah ia mampu memberikan kesaksian yang benar (Priyadi, 2011: 81).

## 3. Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran data sejarah seringkali disebut juga dengan analisis sejarah. Kata analisis sendiri berarti menguraikan, dan secara terminologis berbeda dengan sintesis yang berarti menyatukan. Lebih jelasnya bahwa interpretasi data atau analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan dalam katagori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola,

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2008: 244).

Dengan begitu analisis sejarah itu sendiri bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama-sama dengan teori-teori disusunlah fakta itu kedalam suatu interpretasi yang menyeluruh (Abdurrahman, 1999: 61-62).

#### 4. Historiografi

Sebagai fase terakhir dalam penulisan sejarah, historiografi ini merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan. Layaknya laporan ilmiah, penulisan hasil penelitian sejarah itu hendaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian, sejak awal (fase perencanaan) sampai dengan tahap terakhir (penarikan kesimpulan). Jadi dengan penulisan sejarah itu akan ditentukan mutu penelitian sejarah itu sendiri (Abdurrahman, 1999: 67).

## H. Sistematika Penyajian

Hasil penelitian ini ditulis dan disusun menggunakan sistematika berikut ini:

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, manfaat penelitian, landasan teori dan pendekatan, metode penelitian, dan sistematika penyajian.

BAB II: Kondisi Desa Adireja Wetan terdiri dari keadaan umum Desa Adireja Wetan, dan keadaan sosial ekonomi Desa Adireja Wetan.

BAB III: Sejarah Kepemimpinan Kepala Desa Adireja Wetan terdiri dari sejarah Desa Adireja Wetan dan, profil Kepala Desa Adireja Wetan tahun 1999-2013.

BAB IV: Pelaksanaan Pembangunan Desa Adireja Wetan tahun 1999-2013 terdiri dari pembangunan Desa Adireja Wetan, hambatan pembangunan Desa Adireja Wetan.

BAB V: Kesimpulan dan saran, pada bab inilah tempat penyajian simpulan-simpulan dari penelitian sekaligus merupakan jawaban atas pokok permasalahan, dari kesimpulan itu maka dirumuskan beberapa saran yang dianggap perlu untuk mendapat perhatian.